

970 / KOM - D / SD-SI / 2010

**PERANAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL DALAM MENINGKATKAN
PRESTASI KERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT XIII
KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jurusan Ilmu Komunikasi (S.Sos)**



Oleh:

AGUSMAR

Nim:

**PROGRAM S.1
JURUSAN ILMU KOMUNIKASI**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2010

ABSTRAK

“Peranan Masyarakat Terhadap Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”

Keberhasilan dari suatu pemerintah Desa terletak pada Pamerintahannya sendiri dalam hal ini pamerintah telah membuat undang-undang mengenai Pamerintah Desa, salah satunya adalah undang-undang Nomor 32 tahun 2004, yang isinya menyebutkan bahwa Desa dapat mengurus dan mengatur desanya masing-masing atau telah diberikan hak otonom. Badan Perwakilan Desa adalah suatu lembaga yang merupakan suatu perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan desa. Dalam perencanaan pembangunan Desa, pamerintah Desa dalam hal ini kepala desa seyogiyanya tidak merencanakan sendiri perencanaan pembangunan tersebut tanpa melibatkan lembaga lainnya, lembaga yang paling berpengaruh untuk menampung aspirasi masyarakat Desa adalah lembaga Badan Perwakilan Desa (BPD) maka seharusnya kepala desa sebagai yang tertinggi di desanya seharusnya bekerja sama dengan lembaga BPD tersebut dalam menetapkan perencanaan pembangunan desa, serta harus mengikut sertakan masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah : penulis ingin mengetahui Bagaimana Peranan Masyarakat Terhadap Badan Perwakilan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kampar dan ini merupakan fokus permasalahan yang akan penulis teliti.

Dalam proses penjarangan dan pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi, angket, wawancara dan dokumentasi setelah data dapat dikumpulkan dan disusun secara sistematis maka langkah penulis selanjutnya yaitu menganalisa data tersebut dan kemudian data-data tersebut diolah akan dipaparkan dalam bentuk kata-kata sehingga teknik ini disebut dengan istilah Deskriptif Kualitatif Porsentase

Adapun Rumus yang akan di gunakan adalah :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

P = Angka Porsentase

N = Jumlah Frekuensi

F = Frekuensi yang sedang di cari

Selanjutnya untuk memudahkan dalam memahami tinggi dan rendahnya Pernanan Masyarakat terhadap Badan Perwakilan Desa (BPD) di dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kampar maka akan di berikan ukuran sebagai berikut :

Berperan : 76-100 %

Kurang Berperan : 56- 75 %

Tidak Berperan : 40- 55 %

Dari data-data yang telah penulis kumpulkan dan penulis paparkan maka dapatlah diketahui bahwa nilai Peranan Masyarakat Terhadap Badan Perwakilan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kampar adalah 53,53% di mana nilai tersebut berada dalam katagori tidak berperan yaitu 40-55 % dengan demikian Peranan Masyarakat terhadap Badan Perwakilan Desa dapat dikatakan tidak Berperan dalam perencanaan pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kampar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

ABSTRAK..... ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI..... v

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Alasan Pemilihan Judul..... 7

C. Penegasan Istilah..... 7

D. Batasan Masalah..... 8

E. Perumusan Masalah 8

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

G. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional..... 9

H. Metode Penelitian..... 13

I. Sistematika Penulisan 15

BAB. II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Wilayah 18

1. Keadan Penduduk..... 19

2. Mata Pencaharian 20

3. Agama 22

4. Pendidikan..... 23

BAB. III PENYAJIAN DATA 25

BAB. IV ANALISA DATA

A. Peranan Masyarakat Terhadap Badan Perwakilan Desa (BPD)
dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Ranah Kecamatan
Kampar Kabupaten Kampar..... 47

BAB. V PENUTUP

A. Kesimpulan 56
B. Saran..... 56

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembicaraan mengenai undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengandung esensi kepada masalah otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi Daerah juga merupakan hak Daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, berdasarkan tuntutan dan dukungan dari masyarakat sebagai bentuk pelayanan masyarakat. (PP. Kabupaten Kampar No. 09 Tahun 2007).

Kebijakan tersebut memberikan kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam seluruh proses kebijakan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Masyarakat daerah baik sebagai satu kesatuan kelompok maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan Daerah, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi Daerah bertujuan untuk meujudkan masyarakat yang sejahtera di Daerah yang bersangkutan (Soekartawi, 1995 Hal, 30)

Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur sistem pemerintahan dalam tiga tingkatan utama, yakni Propinsi sebagai daerah otomoni terbatas, Kabupaten sebagai daerah otonom penuh dan Desa sebagai daerah otonom asli Artinya Undang-Undang No 32 Tahun 2004

juga mengatur sistem pemerintahan Desa dengan menempatkan Desa sebagai salah satu Daerah otonom yang bersifat asli. Kehadiran otonomi Daerah bagi setiap warga di Desa memberikan dinamika dan suasana baru dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Desa yaitu Desa dituntut untuk melaksanakan perencanaan pembangunan di pedesaan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Desa baik dalam perencanaan jangka pendek, menengah maupun perencanaan jangka panjang (Abipraja, 2005 Hal. 37)

Konsekuensi implementasi otonomi Daerah salah satu perubahan yang fundamental adalah terjadinya pergeseran struktur politik pemerintahan Desa yang jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Angin segar yang di bawah arus reformasi adalah lahirnya kelembagaan politik ditingkat Desa yang diharapkan memberikan dinamika dan suasana politik yang lebih Demokratis, otonom, independen dan sekaligus prospektif dalam pembangunan masyarakat Desa. Pengaturan mengenai Desa dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 adalah :

1. Pembentukan, penghapusan dan pembangunan Desa
2. Pemerintahan Desa
3. Badan Perwakilan Desa
4. Keuangan Desa
5. Kerjasama antar Desa (Undang-Undang Tahun 2004 Nomor 23)

Makna yang utama dari Undang-Undang ini bagi Desa adalah kedudukan Desa yang tidak lagi di bawah Kecamatan. Akan tetapi Desa adalah entitas politik yang otonom Fungsi Kecamatan dalam konteks ini adalah sekedar

menjalankan fungsi administratif dan koordinasi wilayah Kecamatan sesuai dengan status Kecamatan yang tidak lagi merupakan sebuah wilayah kekuasaan melainkan perpanjangan tangan dari Kabupaten.

Hal yang paling menarik sekali dan penting dalam struktur pemerintahan Desa adalah hadirnya Badan Perwakilan Desa (BPD) yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintahan Desa. Kehadiran BPD ditingkat Desa hendaknya diarahkan pada pembangunan hubungan yang sinergis antara lembaga legislatif dan eksekutif Desa tanpa perlu kesalah pahaman yang menjurus pada timbulnya konflik yang dapat mengganggu proses menegakkan demokrasi di Desa. Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai wakil-wakil rakyat di tingkat desa yang seperti diperagakan oleh lembaga yang melaksanakan fungsi legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, propinsi dan pusat (PP. Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 09 Hal. 02)

Propinsi Riau merupakan salah satu propinsi yang telah menjalankan sistem otonomi daerah. Kabupaten Kampar terletak di Propinsi Riau yang terdiri dari 14 Kecamatan telah memiliki Badan Perwakilan Desa.

Adapun nama-nama Kecamatan tersebut antara lain :

1. Kecamatan Tambang
2. Kecamatan Kampar Utara
3. Kecamatan Kampar
4. Kecamatan Rumbio Jaya
5. Kecamatan Bangkinang
6. Kecamatan Bangkinang Barat

7. Kecamatan Tapung Hulu

8. Kecamatan Tapung Hilir dan lain-lain.

Salah satu Desa yang telah menjalankan fungsi Badan Perwakilan Desa adalah Desa Ranah Kecamatan Kampar. Kehadiran Badan Perwakilan Desa diharapkan mampu mengakomodir seluruh keterwakilan dari masyarakat Desa dan diharapkan mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada lembaga atau institusi yang berwenang. (Handyaniningrat Tahun 1984 Hal. 27)

Badan Perwakilan Desa diharapkan mampu menjadi alat kontrol dalam pelaksanaan pembangunan Desa sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik Desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa Hal ini dapat terealisasi apabila Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai mitra Kepala Desa berperan aktif dalam perencanaan pembangunan Desa bersama Kepala Desa dan masyarakat. (PP. Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 9 Hal. 02)

Kehadiran Badan Perwakilan (BPD) di Desa Ranah diharapkan mampu mengakomodir seluruh keterwakilan dari masyarakat Desa dan diharap mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada lembaga atau intitusi yang berwenang.

Badan Perwakilan Desa (BPD) menjadi alat kontrol bagi pemerintah Desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan Desa sehingga diharapkan pemerintahan Desa komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya Akan tetapi Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang tidak melibatkan berbagai

perwakilan dari masyarakat yang ada akan mengakibatkan pelaksanaan fungsinya tidak optimal (PP. Kabupataen Kampar Tahun 2007 Nomor 9 Hal.09)

Padahal kegagalan dan kurang optimalnya sebuah lembaga karna kurang baik dalam menjalankan peranan serta fungsinya disebabkan karena secara individu maupun lembaga harus memiliki kinerja yang baik. Pemerintah desa Ranah tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya satu lembaga yang mampu mengontrol seluruh program kerja dalam rangka pembangunan desa, dengan adanya Badan Perwakilan Desa (BPD) diharapkan mampu mengakomodir kepentingan masyarakat secara efektif dan efisien.

Salah satu fungsi dari Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Ranah sebagai mitra Kepala Desa dituntut berperan aktif dalam membangun Desa bersama pemerintah Desa dan masyarakat. Badan Perwakilan Desa juga berfungsi menampung aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang dan mengikut sertakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Citra Umbara, 2004 Hal, 41).

Perencanaan pembangunan yang melibatkan banyak orang diharapkan mampu dilaksanakan badan perwakilan Desa Ranah sebagai lembaga yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dimana dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap tahapan sehingga terciptanya suatu kesepakatan dalam upaya peningkatan pembangunan. (PP. Kabupaten Kampar Tahun 2007 Pasal 6 Bab II)

Perencanaan merupakan proses awal dari pelaksanaan pembangunan, melalui proses perencanaan dapat desain keteraturan dalam pencapaian target-

target pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah Dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat berjalan seperti yang diharapkan dan tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaan karena perencanaan dihimpun dari aspirasi masyarakat untuk kepentingan masyarakat dan sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat, agar tidak terjadi penolakan terhadap pelaksanaan pembangunan seperti yang sering terjadi pada saat ini.

Berdasarkan undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, pembangunan yang ada pada tahap yang paling awal adalah perencanaan pembangunan di desa yang menjadi bahan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan seterusnya. Pada tingkat desa, perencanaan pembangunan dilakukan oleh perangkat desa dan LKMD desa tersebut yang mengandung seluruh elemen masyarakat untuk menentukan prioritas kegiatan yang akan diusulkan pada musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat kecamatan.

Dalam usaha peningkatan pembangunan Desa Ranah Badan Perwakilan Desa (BPD) yang berperan penting dalam menampung aspirasi masyarakat. (PP. Kab.Kampar Nomor 9 Pasal 3 Tahun 2007)

Berdasarkan pemikiran di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Peranan Masyarakat Terhadap Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kampar”**

B. Alasan Pemilihan Judul

Yang menjadi alasan bagi penulis untuk memilih judul tersebut di atas sebagai berikut :

1. Sepengetahuan penulis masalah ini belum pernah diteliti
2. Dari segi waktu, dana dan kemampuan penulis merasa sanggup untuk melakukannya

C. Penegasan Istilah

Dalam penulisan ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan untuk memberikan pengertian di samping mempermudah pemahaman antara lain :

- Peranan merupakan perilaku-perilaku yang timbul karena suatu posisi atau jabatan (Mifta Toha 2001 Hal. 376)
- Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa (PP. Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 9 Bab I Pasal 1)
- Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penggunaan sumber-sumber daya alam, manusia, dan keuangan yang terbatas, serta adanya unsur-unsur sosial budaya dengan penetapan prioritas kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan (Kuncoro, 2004 Hal. 37)

D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Dalam penulisan ini penulis lebih memfokuskan kepada peranan Masyarakat Terhadap Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kampar.

E. Rumusan Masalah

Menurut Dr. Suharmi Arikunto (1996 : 19) Dalam penelitian harus jelas dirumuskan masalah dengan jelas agar penelitian dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga akan jelas dari mana harus dimulai dan kemana harus pergi.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Peranan Masyarakat Terhadap Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kampar.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Masyarakat terhadap Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kampar.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan dan bahan masukan bagi BPD, Kepala Desa dan masyarakat Desa ranah kecamatan kampar.
2. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

G. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan serangkaian konsep, defenisi dan proporsi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dengan betujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut(Masri dan Effendi 1995 Hal.48)

Untuk melihat gambaran penelitian ini secara umum dalam kerangka teoritis ini penulis akan sedikit membahas mengenai peranan Masyarakat Terhadap Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kampar

Berdasarkan referensi yang ada, belum ada kesatuan persepsi tentang arti kata peranan, karena itu dalam rangka menyatukan persepsi, maka berikut ini akan disajikan beberapa defenisi tentang kata peranan.

Menurut Gros, Mason dan Meaacheren mendefenisikan peran adalah sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu-individu yang menempati kedudukan sosial tertentu (David Berry 1998 Hal.48)

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto peranan adalah *Pertama* : Perilaku seseorang atas kedudukan tertentu dan hubungannya dengan masyarakat. *Kedua* : Peranan adalah suatu komplek penghargaan manusia terhadap cara bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosial. *Ketiga* : Peranan adalah pola tingkah laku yang didasarkan atas kedudukan tertentu dalam kolektivitas atau keadaan sosial tertentu (Soerjono, Jakarta Pers Hal. 54)

Sementara itu menurut kamus bahasa Indonesia di katakan bahwa yang dimaksud dengan peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal peristiwa.

Dari beberapa defenisi peranan yang telah penulis paparkan di atas, maka suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep atau perihal apa yang di dapat oleh individu di dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu dalam struktur sosial masyarakat(Ibid. Hal. 268)

Di dalam peranan itu sendiri terdapat dua macam harapan yaitu :

1)Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran. 2) Harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranan atau kewajibannya.

Konsep peranan yang didefinisikan di atas, dalam menekankan pada perspektif “masyarakat”, memberikan gambaran yang lebih bersifat statis dan deterministic. Bahwa benar, memang individu dapat menafsirkan sendiri “harapan-harapan” yang ditujukan padanya dalam menjalankan peran-perannya melalui referensi groupnya, tapi bagaimanapun juga ia harus memenuhi harapan-harapan tersebut. Walaupun dalam beberapa hal diberi kebebasan dan keleluasaan tetapi syarat dasar dari peranan adalah bersifat pasti dan statis (Endang Turmadi, Op Cit, Hal. 55)

Sementara itu, bentuk-bentuk peranan dalam kehidupan manusia sebagai mahluk sosial meliputi :

a. Peranan Individu

Peranan individu adalah sebagai seorang individu menjalankan perannya sebagai mahluk sosial dalam berhubungan dengan individu.

b. Peranan Kelompok

Peranan kelompok merupakan kerja sama dua orang individu atau lebih dalam menjalankan perannya sebagai pemberi harapan kepada orang lain.

Dari penjelasan tentang peranan yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dilihat dan dibedakan berbagai macam peranan seseorang atau kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Namun dalam pelaksanaannya peranan itu hanya bisa terbukti dengan adanya usaha untuk menggerakkan orang atau kelompok yang bersangkutan agar dapat berperan dalam suatu program atau kegiatan. Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara peraturan Desa dan Badan Perwakilan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Perda Kab.Kampar No 11 Tahun 2007 tentang Peraturan Daerah Badan perwakilan Desa)

Disamping dari itu Badan Perwakilan Desa adalah suatu Badan yang menjalankan perannya sebagai pemberi harapan kepada orang lain.

Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan badan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa. Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah atau mufakat. Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah enam (6) tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling

banyak 13 (tiga belas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. (Citra Umbara, 2004)

2. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap konsep teoritis. Guna untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap penelitian ini oleh pihak pembaca, maka istilah-istilah pokok yang khusus dalam penelitian ini perlu dibuat dalam konsep operasional dan diartikan sebagai pengertian khusus yang berlaku dalam pengertian ini.

Sesuai dengan teori-teori yang telah penulis paparkan dalam kerangka teoritis di atas, maka Peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar perlu dioperasionalkan dalam rumus objek kajian berikut ini.

Semua unsur yang terlibat di dalam Peran ini, baik itu kepala desa, anggota atau pengurus BPD, dan masyarakat yang berdomisili di Desa Ranah Kecamatan Kampar. Adapun indikator dari peranan masyarakat terhadap Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah :

1. Menyampaikan usul atau pendapat
2. Menghadiri musyawarah rencana pembangunan desa (musrengbang)
3. Menetapkan APBDes
4. Merumuskan dan menetapkan peraturan Desa, merumuskan dan menetapkan kegiatan yang akan dilakukan. (PP. Kabupaten Kampar Tahun 2007 Pasal 4 Bab II)

H. Metode Penelitian

Metode ini tergolong kepada penelitian diskriptif-kualitatif oleh karna itu analisa yang digunakan adalah teknik analisa data deskriptif-kualitatif , yaitu mencari data yang diperoleh dan kemudian disajikan apa adanya kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan kalimat-kalimat yang jelas dan tidak dalam bentuk angka.

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan adalah di Desa Ranah Kecamatan Kampar Terhitung dari Tanggal 13 November 2009 Sampai tanggal 10 Januari 2010

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah melihat peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) dan yang menjadi objek adalah perencanaan pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kampar.

3. Populasi dan Sample

Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan masyarakat yang berdomisili di Desa Ranah Kecamatan Kampar yang berjumlah 3.017 jiwa karena populasinya banyak maka penulis mengambil sample yaitu sebanyak 250 orang atau 20 % .

4. Metode Pengumpulan Data.

a. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan hasil Dokumentasi yang ada di Kantor Desa dan di Kantor Badan Perwakilan Desa Ranah Kecamatan Kampar.

b. Wawancara

Penulis mengadakan wawancara dengan Kepala Desa , anggota atau pengurus badan perwakilan desa (BPD) dan masyarakat yang berdomisili di Desa Ranah kecamatan kampar.

c. Observasi.

Dengan cara melihat dan mengamati secara langsung ke lokasi penelitian.

d. Kuesioner

Merupakan pengumpulan Data yang dilakukan dengan cara membuat Daftar pertanyaan yang diajukan kepada para responden penelitian menyangkut perihal segala sesuatu informasi dan masukan yang dibutuhkan dalam penelitian. Hal ini dimaksudkan guna mendapatkan Data yang akurat dan sesuai dengan fakta dan kondisi dearah penelitian.

5. Teknik analisis Data

Teknik analisa Data bertujuan untuk menganalisa Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, setelah Data yang berasal dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis maka langka selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut, kemudian data yang ada akan dibagi menjadi dua kelompok yaitu data kualitatif yang digambarkan bentuk kata-kata atau kalimat. Sedangkan data kuantitatif dalam bentuk angka-angka yang diporsentasekan selanjutnya ditransformasikan atau dirubah dalam bentuk kata-kata setelah mendapatkan hasil akhir akan dikualitatifkan kembali teknik ini dikenal dengan istilah teknik Deskriptif kualitatif *prosentase*.

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Suhar Arikunto, Op Cit, Hal. 246)

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

P : Angka persentase

N : Number of cases (jumlah frekuensi)

F : Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

Setelah mendapat hasil akhir akan dikuantitatifkan dengan kata-kata atau kalimat yang dimaksud adalah sebagai berikut

Berperan = 76 – 100 %

Kurang berperan = 56 – 75 %

Tidak berperan = 40 – 55 %

I. Sistematika Penulisan

Pembahasan dari penulisan ini akan dituangkan dalam lima BAB yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya secara logis dan organis. Adapun pembahasannya sebagai berikut :

BAB Kesatu : Adalah Pendahuluan. Bab ini akan diawali dengan latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB Kedua : Adalah gambaran umum lokasi penelitian, keadaan geografis Desa Ranah, keadaan penduduk, pendidikan, kondisi

keagamaan, mata pencaian penduduk, kebudayaan, dan adat
istiadat masyarakat Desa Ranah Kecamatan Kampar.

BAB Ketiga : Adalah Penyajian Data. Menguraikan tentang Peranan
Masyarakat Terhadap Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam
perencanaan pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kampar.

BAB Keempat : Adalah Analisis Data

BAB Kelima : Adalah Penutup. Bab ini memberikan kesimpulan terhadap
pembukaan Bab-Bab sebelumnya dan saran-saran bagi pembaca
dan yang akhirnya adalah penutup

Daftar Pustaka

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Wilayah

Desa Ranah adalah Salah satu Desa yang berada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar secara geografis letak Desa Ranah sangat strategis karena dekat dengan kantor Kecamatan juga berbatasan dengan wilayah dan sungai yaitu:

1. Sebelah utara : Sungai kampar
2. Sebelah selatan : Desa Bukit ranah
3. Sebelah Barat : Sungai kampar
4. Sebelah Timur : Sungai kampar

Desa Ranah memiliki wilayah yang seluas 84 Ha² yang terdiri dari 4 Dusun 16 RW dan 16 RT

Walaupun secara Geografis Penduduk Desa Ranah Kecamatan Kampar yang begitu padat namun masyarakat Desa Ranah masih kuat memegang adat istiadat serta rasa kebersamaan yang tinggi dikalangan mereka. Hal ini nampak jelas dalam berbagai acara seperti acara adat dalam resepsi pernikahan. Untuk lebih jelasnya lagi tentang keadaan Kantor Kepala Desa Ranah Kecamatan Kampar maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL I
KEADAAN KANTOR KEPALA DESA RANAH
KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	HABIBUN NAZAR	Kepala Desa	-
2	AMIRUDDIN	Sekretaris Desa	-
3	M. YANIS, T	Kaur Pemerintahan	-
4	NUR AZMI	Kaur Umum	-
5	NURSELISIH	Kaur Keuangan	-
6	ILYAS	Kaur Pembangunan	-
6	SUHARLIS	Kepala Dusun I	-
7	AGUS ZAINI	Kepala Dusun II	-
8	M. TUSAR	Kepala Dusun III	-
9	ABD. KHOLIS	Kepala Dusun IV	-

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Ranah Kecamatan Kampar Tahun 2009

1. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data yang penulis kumpulkan pada bulan Nopember tahun 2009 bahwa penduduk Desa Ranah Kecamatan Kampar adalah lebih kurang 3017 jiwa dengan perincian laki-laki 1364 dan perempuan 1653 dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 714 untuk lebih jelas lagi dalam melihat keadaan penduduk Desa Ranah Kecamatan Kampar, maka penulis membuat dan menjelaskan lewat tabel berikut :

TABEL II
JUMLAH PENDUDUK DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No	Jenis kelamin	F	P
1	Laki-Laki	1364	45,21
2	Prempuan	1653	54,78
	Jumlah	3017	100 %

Sumber Data : *Kantor Kepala Desa Ranah Kecamatan Kampar Tahun 2009.*

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk menurut jenis di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dimana jumlah penduduk yang laki-laki sebanyak 1364 jiwa sedangkan yang perempuan berjumlah 1653 jiwa hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berada di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar berjumlah 3017 jiwa .

2. Mata Pencaharian

Sumber mata pencaharian adalah suatu hal yang sangat urgen (penting) bagi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian halnya bagi masyarakat Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar mereka mencari nafkah demi terpenuhinya kebutuhan hidup dengan kemampuan dan skill yang mereka miliki.dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat Desa Ranah Kecamatan Kampar memiliki beragam bentuk pekerjaan mulai dari pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik yang begitu berat dan ada juga pekerjaan yang tidak banyak membutuhkan tenaga namun membutuhkan keahlian seperti guru, pegawai negeri dan pekerjaan lain yang masyarakat geluti.

untuk lebih jelasnya penulis membuat tabel tentang jumlah penduduk menurut mata pencarian di bawah ini.

TABEL III
JUMLAH PENDUDUK DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR MENURUT MATA PENCAHARIAN

No	Mata Pencaharian	F	P
1	PNS/ Honorer	11	2,71
2	TNI/ POLRI	-	-
3	Pensiunan	14	3,45
4	Karyawan/ Swasta	-	-
5	Wirausaha	1	0,24
6	Petani	208	51,35
7	Nelayan	112	27,65
8	Pertukangan	4	0,98
9	Peternakan	15	3,70
10	Buruh tani	20	4,93
11	Pencari hasil hutan	5	1,23
12	Penjahit	15	3,70
13	Pemulungan	-	-
	Jumlah	405	100%

Catatan : sebanyak 2.612 orang belum punya pekerjaan tetap

Sumber Data : *Kantor Kepala Desa Ranah Kecamatan Kampar Tahun 2009.*

3. Agama

Agama yang dianut penduduk Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah 100% memeluk agama Islam. untuk lebih jelas lagi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini .

TABEL IV
JUMLAH PENDUDUK DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN JUMLAH PEMELUK AGAMA

NO	PEMELUK AGAMA	F	P
1	Islam	3017	100 %
2	Kristen Protesten	0	0 %
3	Budha	0	0 %
4	Hindu	0	0 %
5	Kristen Katolik	0	0 %
	Jumlah	3017	100 %

Sumber Data : *Kantor Kepala Desa Ranah Kecamatan Kampar Tahun 2009.*

Dilihat dari ketengan yang ada di dalam tabel di atas maka sudah jelas bahwa 100 % penduduk Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah memeluk agama Islam yaitu dengan jumlah 3017 jiwa atau 100 %, oleh karna itu jumlah tempat ibadah baik itu masjid atau mushallah/ Surau di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL V

DAFTAR JUMLAH RUMAH IBADAH DI DESA RANAH
KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushallah/ Surau	8
	Jumlah	10

Sumber Data : *Kantor Kepala Desa Ranah Kecamatan Kampar Tahun 2009.*

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator yang turut mempengaruhi seseorang dalam memberikan respon ataupun persepsi-persepsi terhadap stimulus yang diterimanya. Kesadaran sebagian kecil masyarakat Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar akan pentingnya pendidikan bagi setiap orang telah membuat sebagian kecil juga penduduk Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar berlomba-lomba untuk menuntut ilmu diberbagai sekolah maupun perguruan tinggi baik yang ada di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar maupun di luar desa tersebut.

Untuk lebih jelas lagi masalah rincian jumlah penduduk berdasarkan jenjang pendidikan maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL VI

KLASIFIKASI JUMLAH PENDUDUK DESA RANAH
KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	F	P
1	Belum Sekolah	305	26,22
2	TK	40	3,43
3	SD	396	34,04
4	SMP/SLTA	227	19,51
5	Diploma	9	0,77
6	S-1	3	0,25
7	S-2	1	0,08
8	Kursus/Pelatihan	-	0
9	Pondok Pesantren	13	1,11
10	SLB	72	6,19
11	Tidak sekolah	97	8,34
	Jumlah	1.163	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Ranah Kecamatan Kampar Tahun 2009.

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kampar.

Penyajian data berikut ini berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Desa Ranah Kecamatan Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan Data tentang Peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kampar. Untuk teknik pengumpulan data sesuai dengan apa yang telah penulis jelaskan pada bab pendahuluan yaitu dengan menggunakan angket, wawancara, dokumentasi dan observasi.

Untuk pengambilan data yang berasal dari kepala Desa dan masyarakat yang berdomisili di Desa Ranah Kecamatan Kampar sesuai dengan sampel yang telah penulis tetapkan, maka penulis menyebarkan angket kepada responden sebanyak 250 eksamplar untuk mencari data tentang Peranan Masyarakat Terhadap Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kampar. Dan data penelitian ini juga penulis ambil dari dokumentasi/ arsip di kantor kepala Desa Ranah Kecamatan Kampar

Untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kampar dapat kita lihat dari hasil wawancara penulis dan hasil observasi dengan kepala Desa dan masyarakat yang berdomisili di Desa Ranah Kecamatan Kampar. Adapun hasil wawancara penulis dan hasil obsevasi sebagai berikut :

TABEL VII
JAWABAN RESPONDEN TENTANG PERNAHKAH BPD DESA RANAH
MENAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT

No	Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	A	Pernah	97	38,8 %
2	B	Kadang-Kadang	33	13,2 %
3	C	Tidak Pernah	120	48 %
Jumlah			250	100 %

Wawancara 02 Desember 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden tentang pernahkah BPD Desa Ranah menampung aspirasi masyarakat yaitu 120 atau 48 % responden menjawab tidak pernah dan 33 atau 13,2 % responden yang menjawab kadang-kadang dan sementara itu 97 atau 38,8 % responden menjawab pernah.

Dari Frekuensi di atas terlihat jelas bahwa BPD Desa Ranah tidak pernah menampung aspirasi masyarakat yaitu 120 orang dan 33 orang yang menyatakan BPD Desa Ranah kadang-kadang menampung aspirasi masyarakat dan sementara itu jawaban yang menyatakan BPD Desa Ranah pernah menampung aspirasi masyarakat yaitu 97 orang.

TABEL VIII
JAWABAN RESPONDEN TENTANG TAHUKAH BAPAK ATAU IBU
KEBERADAAN BPD DI LINGKUNGAN BAPAK

No	Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	A	Tahu	92	36,9 %
2	B	Kurang Tahu	89	35,6 %
3	C	Tidak Tahu	69	27,5 %
Jumlah			250	100 %

Wawancara 02 Desember 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden tentang tahukah bapak atau ibu keberadaan BPD di lingkungan bapak yaitu 69 atau 27,5 % yang menjawab tidak tahu dan 89 atau 35,6 % responden menjawab kurang tahu dan sementara itu 92 atau 36,9 % responden yang menjawab tahu.

Dari Frekuensi di atas nampak jelas bahwa 69 orang menjawab tidak tahu tentang keberadaan BPD di lingkungannya dan 89 orang yang menjawab kurang tahu tentang keberadaan BPD di lingkungannya dan sementara itu 92 orang yang menyatakan tahu tentang keberadaan BPD di lingkungannya.

TABEL IX
JAWABAN RESPONDEN TENTANG TAHUKAH BAPAK ATAU IBU
JUMLAH ANGGOTA BPD DI LINGKUNGAN BAPAK

No	Option	Jawaban Alternatif	Frekuensi	%
1	A	Tahu	115	46 %
2	B	Kurang Tahu	65	26 %
3	C	Tidak Tahu	70	28 %
Jawaban			250	100 %

Wawancara 02 Desember 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden tentang tahukah bapak atau ibu jumlah anggota BPD di lingkungan bapak atau ibu yaitu 70 atau 28 % yang menjawab tidak tahu dan 65 atau 26 % yang menjawab kurang tahu dan sementara itu 115 atau 46 % yang menjawab tahu tentang jumlah anggota BPD di lingkungannya

Dari Ferkuensi di atas nampak jelas bahwa jawaban responden yang menjawab tidak tahu jumlah anggota BPD dilingkungannya yaitu 70 orang dan jawaban responden yang mengatakan kurang tahu yaitu 65 orang dan sementara itu jawaban responden yang mengatakan tahu tentang jumlah BPD dilingkungannya yaitu 115 orang.

TABEL X
JAWABAN RESPONDEN TENTANG TAHUKAH BAPAK ATAU IBU
BAHWA KEGIATAN BPD MENYANGKUT UNTUK
KEPENTINGAN MASYARAKAT

No	Option	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	A	Tahu	117	46,8 %
2	B	Kurang Tahu	103	41,2 %
3	C	Tidak Tahu	30	12 %
Jumlah			250	100 %

Wawancara 02 Desember 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden tentang kegiatan BPD menyangkut untuk kepentingan masyarakat yaitu 30 atau 12 % menjawab tidak tahu dan 103 atau 41,2 % yang menjawab kurang tahu dan sementara itu 117 atau 46,8 % yang menjawab tahu tentang kegiatan BPD menyangkut untuk kepentingan masyarakat.

Dari Frekuensi di atas nampak jelas bahwa jawaban responden tentang kegiatan BPD menyangkut untuk kepentingan masyarakat yaitu 30 orang yang mengatakan tidak tahu dan 103 orang yang mengatakan kurang tahu dan sementara itu 117 orang yang mengatakan tahu tentang kegiatan BPD menyangkut untuk kepentingan masyarakat.

TABEL XI
JAWABAN RESPONDEN TENTANG TAHUKAH BAPAK ATAU IBU
FUNGSI DAN WEWENANG BPD YANG ADA
DILINGKUNGAN BAPAK

No	Option	Jawaban Alternatif	Frekuensi	%
1	A	Tahu	60	24 %
2	B	Kurang Tahu	40	16 %
3	C	Tidak Tahu	150	60 %
Jumlah			250	100 %

Wawancara 02 Desember 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden tentang fungsi dan wewenang BPD yang ada dilingkungan bapak yaitu 150 atau 24 % responden yang menjawab tidak tahu dan 40 atau 16 % responden yang menjawab kurang tahu dan sementara itu 60 atau 24 % responden yang menjawab tahu tentang fungsi dan wewenang BPD yang ada dilingkungan bapak.

Dari Frekuensi di atas nampak jelas bahwa jawaban responden yang menjawab tidak tahu tentang fungsi dan wewenang BPD yang ada di lingkungannya yaitu 150 orang dan 40 orang yang menjawab kurang tahu dan sementara itu 60 orang yang menjawab tahu fungsi dan wewenang BPD yang ada dilingkungannya

TABEL XII
JAWABAN RESPONDEN TENTANG PERNAHKAH BPD DESA RANAH
MENCIPTAKAN KOMUNIKASI YANG BAIK ANTAR PEMERINTAH DESA

No	Option	Jawaban Alternatif	Frekuensi	%
1	A	Pernah	20	8 %
2	B	Kadang-Kadang	130	52 %
3	C	Tidak Pernah	100	40 %
Jumlah			250	100 %

Wawancara 02 Desember 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden yang mengatakan tentang pernahkah BPD Desa Ranah menciptakan komunikasi yang baik antar pemerintah desa yaitu 100 responden atau 40 % responden yang menjawab tidak pernah dan 130 atau 52 % responden menjawab kadang-kadang dan sementara itu jawaban responden yang menjawab tentang pernahkah BPD Desa Ranah menciptakan komunikasi yang baik antar pemerintah desa yaitu 20 atau 8 % yang menjawab pernah.

Dari Frekuensi di atas nampak jelas bahwa 100 orang yang menjawab tidak pernah BPD Desa Ranah menciptakan komunikasi yang baik antar pemerintah desa dan 130 orang yang menjawab kadang-kadang dan sementara itu 20 orang yang menjawab pernah BPD Desa Ranah menciptakan komunikasi yang baik antar pemerintah desa.

TABEL XIII
JAWABAN RESPONDEN TENTANG TAHUKAH BAPAK ATAU IBU
PROGRAM –PROGRAM BPD YANG ADA DI LINGKUNGAN BAPAK

No	Option	Jawaban Alternatif	Frekuensi	%
1	A	Tahu	7	2,8 %
2	B	Kurang Tahu	90	36 %
3	C	Tidak Tahu	153	61,2 %
Jumlah			250	100 %

Wawancara 02 Desember 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden tentang tahukah bapak atau ibu program-program BPD yang ada di lingkungan bapak atau ibu yaitu 153 atau 61,2 responden yang mengatakan tidak tahu dan 90 atau 36 % yang menjawab kurang tahu dan sementara itu 7 atau 2,8 % yang mengatakan tahu tentang program-program BPD yang ada di lingkungannya.

Dari frekuensi di atas nampak jelas bahwa 153 orang yang menjawab tidak tahu tentang program-program BPD yang ada di lingkungannya dan 90 orang yang menjawab kurang tahu dan sementara itu 7 orang yang menjawab tahu tentang program-program BPD yang ada di lingkungannya.

TABEL XIV
JAWABAN RESPONDEN TENTANG TAHUKAH BAPAK ATAU IBU
PROGRAM APA SAJA YANG TELAH DILAKUKAN BPD
TAHUN 2009

No	Option	Jawaban Alternatif	Frekuensi	%
1	A	Tahu	51	20,4 %
2	B	Kurang Tahu	60	24 %
3	C	Tidak Tahu	139	55,6 %
Jumlah			250	100 %

Wawancara 02 Desember 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden tentang program yang telah dilakukan BPD di tahun 2009 yaitu 139 atau 55,6 % yang menjawab tidak tahu dan 60 atau 24 % responden yang menjawab kurang tahu dan sementara itu 51 atau 20,4 % responden yang menjawab tahu tentang program yang telah dilakukan BPD di tahun 2009.

Dari Frekuensi di atas nampak jelas bahwa 139 orang yang menjawab tidak tahu tentang program yang telah dilakukan BPD di tahun 2009 dan 60 orang yang menjawab kurang tahu dan sementara itu 51 orang yang menjawab tahu tentang program yang telah dilakukan BPD di tahun 2009

TABEL XV
JAWABAN RESPONDEN TENTANG TAHUKAH BAPAK ATAU IBU
BAGAIMANA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA BPD
DI LINGKUNGAN BAPAK

No	Option	Jawaban Alternatif	Frekuensi	%
1	A	Tahu	152	60,8 %
2	B	Kurang Tahu	70	28 %
3	C	Tidak Tahu	28	11,2 %
Jumlah			250	100 %

Wawancara 02 Desember 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden tentang bagaimana cara pembentukan lembaga BPD di lingkungan bapak atau ibu yaitu 28 atau 11,2 % responden yang menjawab tidak tahu dan 70 atau 28 % responden menjawab kurang tahu dan sementara itu 152 atau 60,8 % responden yang menjawab tahu tentang cara pembentukan lembaga BPD di lingkungannya.

Dari Frekuensi di atas nampak jelas bahwa jawaban responden tentang cara pembentukan BPD di lingkungannya yaitu 28 orang yang menjawab tidak tahu dan 70 orang menjawab kurang tahu dan sementara itu 152 orang yang menjawab tahu tentang cara pembentukan lembaga BPD di lingkungannya.

TABEL XVI
JAWABAN RESPONDEN TENTANG TAHUKAH BAPAK ATAU IBU
BAGAIMANA BPD MENINDAK LANJUTI USUL ATAU PENDAPAT
MASAYARAKAT KE TINGKAT KECAMATAN

No	Option	Jawaban Alternatif	Frekuensi	%
1	A	Tahu	7	2,8 %
2	B	Kurang Tahu	65	26 %
3	C	Tidak Tahu	178	71,2 %
Jumlah			250	100 %

Wawancara 28 Nopember 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden tentang BPD menindak lanjuti usul atau pendapat masyarakat ke tingkat kecamatan yaitu 178 atau 71,2 % responden menjawab tidak tahu dan 65 atau 26 % responden yang menjawab kurang tahu dan sementara itu 7 atau 2,8 % responden yang menjawab tahu tentang bagaimana BPD menindak lanjuti usul atau pendapat masyarakat ke tingkat kecamatan.

Dari frekuensi di atas nampak jelas bahwa jawaban responden tentang bagaimana BPD menindak lanjuti usul atau pendapat masyarakat ke tingkat kecamatan yaitu 178 orang yang menjawab tidak tahu dan 65 orang yang menjawab kurang tahu dan sementara itu 7 orang yang menjawab tahu tentang bagaimana BPD menindak lanjuti usul atau pendapat masyarakat.

TABEL XVII
JAWABAN RESPONDEN TENTANG PERNAHKAH BPD MENGUNDANG
TOKOH ADAT, AGAMA DAN TOKOH PEMUDA UNTUK
MEMBICARAKAN PEMBANGUNAN DESA

No	Option	Jawaban Alternatif	Frekuensi	%
1	A	Pernah	12	4,8 %
2	B	Kadang-Kadang	59	23,6 %
3	C	Tidak Pernah	179	71,6 %
Jumlah			250	100 %

Wawancara 02 Desember 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden tentang pernahkah BPD mengundang tokoh adat, agama dan tokoh pemuda untuk membicarakan pembangunan desa yaitu 179 atau 71,6 % responden menjawab tidak pernah dan 59 atau 23,6 % responden yang menjawab kadang-kadang dan sementara itu 12 atau 4,8 % responden yang menjawab pernah BPD mengundang tokoh adat, agama dan tokoh pemuda untuk membicarakan pembangunan desa.

Dari frekuensi di atas nampak jelas bahwa 179 orang yang menjawab tidak pernah BPD mengundang tokoh adat, agama dan tokoh pemuda untuk membicarakan pembangunan desa dan 59 orang yang menjawab kadang-kadang dan sementara itu 12 orang yang menjawab pernah BPD mengundang tokoh adat, agama dan tokoh pemuda untuk membicarakan pembangunan desa.

TABEL XVIII
JAWABAN RESPONDEN TENTANG TAHUKAH BAPAK ATAU IBU BAGAI
MANA BPD MENGAYOMI DAN MENJAGA ADAT ISTIADAT DESA RANAH
UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN

No	Option	Jawaban Alternatif	Frekuensi	%
1	A	Tahu	81	32,4 %
2	B	Kurang Tahu	90	36 %
3	C	Tidak Tahu	79	31.6 %
Jumlah			250	100 %

Wawancara 02 Desember 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden tentang bagaimana BPD mengayomi dan menjaga adat istiadat Desa Ranah untuk perencanaan pembangunan yaitu 79 atau 31,6 % responden yang menjawab tidak tahu dan 90 atau 36 % responden yang menjawab kurang tahu dan sementara itu 81 atau 32,4 % yang menjawab tahu tentang bagaimana BPD mengayomi dan menjaga adat-istiadat Desa Ranah untuk perencanaan pembangunan.

Dari ferkuensi di atas nampak jelas bahwa jawaban responden yang menjawab bagaimana BPD mmengayomi dan menjaga adat-istiadat Desa Ranah untuk perencanaan pembangunan desa yaitu 79 orang menjawab tidak tahu dan 90 orang yang menjawab kurang tahu dan sementara itu 81 orang yang menjawab tahu tentang bagaimana BPD mengayomi dan menjaga adat-istiadat Desa Ranah untuk perencanaan pembangunan.

TABEL XIX
JAWABAN RESPONDEN TENTANG PERNAHKAH BPD
MENETAPKAN PERATURAN DESA MENYIMPANG
DARI ADAT-ISTIADAT DESA RANAH

No	Option	Jawaban Alternatif	Frekuensi	%
1	A	Pernah	19	7,6 %
2	B	Kadang-Kadang	87	34,8 %
3	C	Tidak Pernah	144	57,6 %
Jumlah			250	100 %

Wawancara 02 Desember 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden tentang pernahkah BPD menetapkan peraturan desa menyimpang dari adat-istiadat Desa Ranah yaitu 144 atau 57,6 % responden menjawab tidak pernah BPD menetapkan peraturan desa menyimpang dari adat-istiadat Desa Ranah dan 87 atau 34,8 % responden yang menjawab kadang-kadang dan sementara itu 19 atau 7,6 % responden yang menjawab pernah BPD menetapkan peraturan desa menyimpang dari adat-istiadat Desa Ranah

Dari frekuensi di atas nampak jelas jawaban responden yang menjawab tentang BPD menetapkan peraturan desa menyimpang dari adat-istiadat Desa Ranah yaitu 144 orang yang menjawab tidak pernah dan 87 orang yang menjawab kadang-kadang dan sementara itu 19 orang yang menjawab pernah BPD menetapkan peraturan desa menyimpang dari adat-istiadat Desa Ranah.

TABEL XX
JAWABAN RESPONDEN TENTANG PERNAHKAH ANGGOTA BPD
TIDAK MENGHADIRI MUSYAWARAH RENCANA
PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDes)

No	Option	Jawaban Alternatif	Frekuensi	%
1	A	Pernah	98	39,2 %
2	B	Kadang-Kadang	131	52,4 %
3	C	Tidak Pernah	21	8,4 %
Jumlah			250	100 %

Wawancara 02 Desember 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden tentang pernahkah BPD tidak menghadiri musyawarah rencana pembangunan desa (MUSRENBANGDes) yaitu 21 atau 8,4 % responden yang menjawab tidak pernah dan 131 atau 52,4 % responden yang menjawab kadang-kadang dan sementara itu 98 atau 39,2 % responden menjawab pernah BPD tidak menghadiri musyawarah rencana pembangunan desa (MUSRENBANGDes).

Dari frekuensi di atas nampak jelas bahwa responden yang menjawab BPD tidak pernah menghadiri musyawarah rencana pembangunan desa (MUSRENBANGDes) yaitu 21 orang dan 131 orang yang menjawab kadang-kadang dan sementara itu 98 orang yang menjawab pernah BPD tidak menghadiri musyawarah rencana pembangunan desa.

TABEL XXI
JAWABAN RESPONDEN TENTANG PERNAHKAH ANGGOTA BPD
TIDAK MENGHADIRI UNDANGAN KEPALA DESA UNTUK
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA RANAH

No	Option	Jawaban Alternatif	Frekuensi	%
1	A	Pernah	67	26,8 %
2	B	Kadang-Kadang	96	38,4 %
3	C	Tidak Pernah	87	34,8 %
Jumlah			250	100 %

Wawancara 02 Desember 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden tentang pernahkah BPD tidak menghadiri undangan kepala desa untuk perencanaan pembangunan Desa Ranah yaitu 87 atau 34,8 % responden menjawab tidak pernah dan 96 atau 38,4 % responden yang menjawab kadang-kadang dan sementara itu 67 atau 26,8 % responden menjawab pernah BPD tidak menghadiri undangan kepala desa untuk perencanaan pembangunan Desa Ranah.

Dari frekuensi di atas nampak jelas bahwa jawaban responden yang mengatakan bahwa BPD tidak pernah menghadiri undangan kepala desa untuk perencanaan pembangunan Desa Ranah yaitu 87 orang dan 96 orang yang menjawab kadang-kadang dan sementara itu 67 orang yang menjawab pernah BPD menghadiri undangan kepala desa untuk perencanaan pembangunan Desa Ranah.

TABEL XXII
JAWABAN RESPONDEN TENTANG TAHUKAH BAPAK ATAU IBU
YANG MENETAPKAN APBDes DI LINGKUNGAN BAPAK
ADALAH BPD DESA RANAH

No	Option	Jawaban Alternatif	Frekuensi	%
1	A	Tahu	90	36 %
2	B	Kurang Tahu	73	29.2 %
3	C	Tidak Tahu	87	34,8 %
Jumlah			250	100 %

Wawancara 02 Desember 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden yang menjawab tentang tahukah bapak atau ibu yang menetapkan APBDes di lingkungan bapak adalah BPD Desa Ranah yaitu 87 atau 34,8 % responden yang menjawab tidak tahu dan 73 atau 29,2 % responden yang menjawab kurang tahu dan sementara itu 90 atau 36 % responden yang menjawab tahu tentang yang menetapkan APBDes di lingkungan bapak atau ibu adalah BPD Desa Ranah

Dari ferkuensi di atas nampak jelas jawaban responden yang mengatakan bahwa yang menetapkan APBDes di lingkungan bapak atau ibu adalah BPD Desa Ranah yaitu 87 orang dan 73 orang yang mengatakan kurang tahu dan sementara itu 90 orang yang mengatakan tahu tentang yang menetapkan apebedes di lingkungannya adalah BPD Desa Ranah.

TABEL XXIII
JAWABAN RESPONDEN TENTANG PERNAHKAH ANGGOTA BPD
UTUSAN DUSUN DENGAN UTUSAN DUSUN LAINNYA KONFLIK
DI DALAM MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA

No	Option	Jawaban Alternatif	Frekuensi	%
1	A	Pernah	136	54,4 %
2	B	Kadang-Kadang	59	23,6 %
3	C	Tidak Pernah	55	22 %
Jumlah			250	100 %

Wawancara 02 Desember 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden tentang pernahkah anggota BPD utusan Dusun dengan utusan Dusun lainnya konflik di dalam musyawarah pembangunan desa yaitu 55 atau 22 % responden yang menjawab tidak pernah dan 59 atau 23,6 responden yang menjawab kadang-kadang dan sementara itu 136 atau 54,4 % responden yang menjawab pernah anggota BPD utusan Dusun dengan utusan lainnya konflik di dalam musyawarah pembangunan desa.

Dari frekuensi di atas nampak jelas bahwa jawaban responden yang menjawab tidak pernah BPD utusan Dusun dengan utusan Dusun lainnya konflik di dalam musyawarah pembangunan desa yaitu 55 orang yang menjawab tidak pernah dan 59 orang yang menjawab kadang-kadang dan sementara itu 136 orang yang menjawab pernah anggota BPD utusan dusun dengan utusan dusun lainnya konflik di dalam musyawarah pembangunan desa.

TABEL XXIV
JAWABAN RESPONDEN TENTANG TAHUKAH BAPAK ATAU IBU
PROGRAM APA SAJA YANG TELAH DIRUMUSKAN OLEH LEMBAGA
BPD UNTUK PEMBANGUNAN DESA RANAH
TAHUN ANGGARAN 2009-2010

No	Option	Jawaban Alternatif	Frekuensi	%
1	A	Tahu	179	71,6%
2	B	Kurang Tahu	61	24,4 %
3	C	Tidak Tahu	10	4 %
Jumlah			250	100 %

Wawancara 02 Desember 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden tentang tahukah bapak atau ibu program apa saja yang telah dirumuskan oleh lembaga BPD untuk pembangunan Desa Ranah tahun anggaran 2009-2010 yaitu 10 atau 4 % responden yang menjawab tidak tahu dan 61 atau 24,4 % responden yang menjawab kurang tahu dan sementara itu 179 atau 71,6 % responden menjawab tahu tentang program yang telah dilakukan oleh lembaga BPD untuk pembangunan Desa Ranah tahun anggaran 2009-2010.

Dari frekuensi di atas nampak jelas bahwa jawaban responden yang menjawab tidak tahu yaitu 10 orang yang mengatakan program BPD yang telah dirumuskan oleh lembaga BPD untuk pembangunan Desa Ranah tahun anggaran 2009-2010 dan 61 orang yang menjawab kurang tahu dan sementara itu 179 orang yang menjawab tahu tentang program yang telah dirumuskan oleh lembaga BPD untuk pembangunan Desa Ranah tahun anggaran 2009-2010.

TABEL XXV
JAWABAN RESPONDEN TENTANG PERNAHKAH LEMBAGA BPD
MENGUNDANG MASYARAKAT DESA RANAH UNTUK
MEMBICARAKAN PEMBANGUNAN DESA

No	Option	Jawaban Alternatif	Frekuensi	%
1	A	Pernah	7	2,8 %
2	B	Kadang-Kadang	90	36 %
3	C	Tidak Pernah	153	61,2 %
Jumlah			250	100 %

Wawancara 02 Desember 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden yang mengatakan tentang pernahkah lembaga BPD mengundang masyarakat Desa Ranah untuk membicarakan pembangunan desa yaitu 153 atau 61,2 % responden yang mengatakan tidak pernah dan 90 atau 36 % responden yang mengatakan kadang-kadang dan sementara itu 7 atau 2,8 % responden yang mengatakan pernah lembaga BPD mengundang masyarakat Desa Ranah untuk membicarakan pembangunan Desa.

Dari frekuensi di atas nampak jelas jawaban responden yang mengatakan tentang lembaga BPD mengundang masyarakat Desa Ranah untuk membicarakan pembangunan desa yaitu 153 orang yang mengatakan tidak pernah dan 90 orang yang mengatakan kadang-kadang dan sementara itu 7 orang yang mengatakan pernah lembaga BPD mengundang masyarakat Desa Ranah untuk membicarakan pembangunan Desa.

TABEL XXVI
JAWABAN RESPONDEN TENTANG TAHUKAH BAPAK ATAU IBU
PROGRAM APA SAJA YANG AKAN DILAKUKAN OLEH LEMBAGA
BPD UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009-2010

No	Option	Jawaban Alternatif	Frekuensi	%
1	A	Tahu	30	12%
2	B	Kurang Tahu	123	49,2 %
3	C	Tidak Tahu	97	38,8 %
Jumlah			250	100 %

Wawancara 02 Desember 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden tentang tahukah bapak atau ibu program apa saja yang akan dilakukan oleh lembaga BPD untuk tahun anggaran 2009-2010 yaitu 97 atau 38,8 % responden menjawab tidak tahu dan 123 atau 49,2 % responden menjawab kurang tahu dan sementara itu 30 atau 12 % responden yang menjawab tahu tentang program yang akan dilakukan oleh lembaga BPD tahun anggaran 2009-2010

Dari frekuensi di atas nampak jelas bahwa jawaban responden yang mengatakan tidak tahu program yang akan dilakukan oleh lembaga BPD untuk tahun anggaran 2009-2010 yaitu 97 orang yang mengatakan tidak tahu dan 123 orang yang mengatakan kurang tahu dan sementara itu 30 orang yang mengatakan tahu tentang program yang akan dilakukan oleh lembaga BPD untuk tahun anggaran 2009-2010

TABEL XXVII
JAWABAN RESPONDEN TENTANG TAHUKAH BAPAK ATAU IBU BERAPA
KALI DALAM SATU TAHUN MUSYAWARAH DI LAKUKAN OLEH BPD
UNTUK PEMBANGUNAN DESA

No	Option	Jawaban Alternatif	Frekuensi	%
1	A	Tahu	76	30,4 %
2	B	Kurang Tahu	113	45,2 %
3	C	Tidak Tahu	61	24,4 %
Jumlah			250	100 %

Wawancara 02 Desember 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden tentang tahukah bapak atau ibu berapa kali dalam satu tahun musyawarah di lakukan oleh BPD untuk pembangunan desa yaitu 61 atau 24,4 % responden menjawab tidak tahu dan 113 atau 45,2 % responden menjawab kurang tahu dan sementara itu 76 atau 30,4 % responden yang menjawab tahu tentang BPD meelakukan musyawarah dalam satu tahun untuk pembangunan desa.

Dari frekuensi di atas nampak jelas bahwa jawaban responden yang mengatakan tidak tahu tentang berapa kali BPD dalam satu tahun musyawarah untuk pembangunan desa yaitu 61 orang yang mengatakan tidak tahu dan 113 orang yang mengatakan kurang tahu dan sementara itu 76 orang yang mengatakan tahu tentang di dalam satu tahun BPD melakukan musyawarah untuk pembangunan desa.

BAB IV

ANALISA DATA

A. Peranan Masyarakat Terhadap Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Pada Bab ini akan disajikan analisa yang terdapat pada Bab III. Data yang dianalisa adalah Data yang bersumber dari jawaban responden terhadap angket yang telah disebar, angket yang telah disebar kepada responden adalah 250 orang untuk mengetahui tentang peranan Masyarakat Terhadap Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kampar, sekaligus juga apa faktor penghambat dan pendukung Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kampar.

Untuk mengetahui Peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kampar maka penulis akan menggunakan rumus persentase rata-rata kualitatif menurut Suharsimi Arikunto yaitu :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 : 3$$

Sebelum dimasukkan ke dalam rumus terlebih dahulu akan disajikan tabel rekapitulasi jawaban responden terhadap angket yang telah disajikan dalam Bab III, tujuannya adalah untuk mengetahui frekuensi dan option masing-masing jawaban responden.

Berdasarkan angket yang telah penulis sebarakan kepada seluruh sampel mulai dari Kepala Desa dan masyarakat yang berdomisili di Desa Ranah Kecamatan Kampar maka hasilnya dapat digambarkan pada tabel rekapitulasi sebagai berikut :

TABEL XXVIII
REKAPITULASI HASIL ANGKET

		A		B		C		FREK	%
No	TABEL	FREK	%	FREK	%	FREK	%		
1	VII	97	38,8	33	13,2	120	48	250	100
2	VIII	92	36,9	89	35,6	69	27,5	250	100
3	IX	115	46	65	26	70	28	250	100
4	X	117	46,8	103	41,2	30	12	250	100
5	XI	60	24	40	16	150	60	250	100
6	XII	20	8	130	52	100	40	250	100
7	XIII	7	2,8	90	36	153	61,2	250	100
8	XIV	51	20,4	60	24	139	55,6	250	100
9	XV	152	60,8	70	28	28	11,2	250	100
10	XVI	7	2,8	65	26	178	71,2	250	100
11	XVII	12	4,8	59	23,6	179	71,6	250	100
12	XVIII	81	32,4	90	36	79	31,6	250	100
13	XIX	19	7,6	87	34,8	144	57,6	250	100
14	XX	98	39,2	131	52,4	21	8,4	250	100
15	XXI	67	26,8	96	38,4	87	34,8	250	100
16	XXII	90	36	73	29,2	87	34,8	250	100
17	XXIII	136	54,4	59	23,6	55	22	250	100
18	XXIV	179	71,6	61	24,4	10	4	250	100
19	XXV	7	2,8	90	36	153	61,2	250	100
20	XXVI	30	12	123	49,2	97	38,8	250	100
21	XXVII	76	30,4	113	45,2	61	24,4	250	100
	JUMLAH	1513		1727		2010			

Dari rekapitulasi di atas dapat diketahui :

$$\text{Frekuensi A} = 1513$$

$$\text{Frekuensi B} = 1727$$

$$\text{Frekuensi C} = 2010$$

Untuk mencari persentase rata-rata di atas digunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 : 3$$

Rekapitulasi di atas dapat diketahui :

$$N = F_a + F_b + F_c$$

$$= 1513 + 1727 + 2010$$

$$= 5250$$

Selanjutnya untuk mencari bobot F dengan terlebih dahulu memberikan bobot untuk masing-masing pilihan (option).

Option a dengan bobot 3

Option b dengan bobot 2

Option c dengan bobot 1

Dari bobot yang telah ditentukan di atas maka dapatlah diperoleh F sebagai berikut :

$$\text{Frekuensi a} = 1513 \times 3 = 4539$$

$$\text{Frekuensi b} = 1727 \times 2 = 3454$$

$$\text{Frekuensi c} = 2010 \times 1 = \underline{2010} +$$

$$8432$$

Berdasarkan dari angka-angka yang telah di peroleh di atas maka dapat dicari porsentase rata-rata kualitatif sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 : 3$$

$$= \frac{100.F}{3.N}$$

$$= \frac{100 (8432)}{3. 5250}$$

$$= \frac{843200}{15750}$$

$$= 53,53$$

Dari porsentase rata-rata kualitatif yang diperoleh di atas adalah porsentase Peranan Masyarakat Terhadap Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Perencanaan pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kampar. Oleh karna itu untuk memahami tinggi dan rendahnya peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kampar maka akan diberi ukurannya menurut Suharsimi Arikunto sebagai berikut :

Berperan = 76 - 100 %

Kurang berperan = 56 - 75 %

Tidak berperan = 40 - 55 %

Jika dilihat dari ukuran di atas maka dapat diketahui bahwa prosentase rata-rata kualitatif di atas dengan nilai 53,53 % berada dalam katagori tidak berperan yaitu 56-75 % dengan demikian Peranan Masyarakat terhadap Badan

Perwakilan Desa (BPD) dapat dikatakan Tidak Berperan dalam perencanaan pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kampar.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan kembali pada tabel-tabel jawaban responden sebagai berikut :

Pada tabel VII, disana lebih jelas hampir separuh yaitu 120 atau 48 % responden yang menjawab bahwa BPD tidak pernah menampung aspirasi masyarakat . *Wawancara penulis pada tanggal 02 Desember 2009*

Pada tabel VIII, tergambar jelas yaitu 92 atau 36,9 % responden menjawab tahu tentang keberadaan BPD di lingkungannya. *Wawancara penulis pada tanggal 02 Desember 2009*

Sementara pada tabel IX, nampak jelas bahwa hampir mendekati separuh yaitu 115 atau 46 % responden yang menjawab tahu tentang jumlah BPD di lingkungannya . *Wawancara penulis 02 Desember 2009*

Selanjutnya pada tabel X, nampak jelas lebih dari separuh Responden yang menjawab tahu tentang kegiatan BPD itu menyangkut untuk kepentingan masyarakat yaitu 117 atau 46,8 % . *Wawancara penulis 02 Desember 2009*

Pada tabel XI, disana dijelaskan bahwa lebih separuh responden yang menyatakan tidak tahu tentang fungsi dan wewenang BPD yang ada di lingkungannya yaitu 150 atau 24 % . *Wawancara penulis 02 Desember 2009*

Pada tabel XII disana di jelaskan bahwa lebih dari separuh yaitu 130 atau 52% responden menyatakan kadang-kadang BPD Desa Ranah menciptakan komunikasi yang baik antar Pemerintah Desa. *Wawancara penulis 02 Desember 2009*

Pada tabel XIII ini di jelaskan lebih separuh yaitu 153 atau 61,2 % responden menyatakan tidak tahu tentang program-program BPD yang ada di lingkungannya. *Wawancara penulis 02 Desember 2009.*

Pada tabel XIV di sana dijelaskan lebih separuh yaitu 139 atau 55,6 % responden menyatakan tidak tahu tentang program yang telah dilakukan BPD tahun 2009. *Wawancara penulis 02 Desember 2009*

Pada tabel XV di jelaskan lebih dari separuh responden yang menyatakan tahu cara pembentukan lembaga BPD di lingkungannya yaitu 152 atau 60,8 % . *Wawancara penulis 02 Desember 2009.*

Sementara Pada tabel XVI di jelaskan lebih dari separuh responden yang menyatakan tidak tahu tentang BPD menindak lanjuti usul atau pendapat masyarakat ke tingkat kecamatan yaitu 178 atau 71,2 %. *Wawancara penulis 02 Desember 2009.*

Pada tabel XVII dijelaskan lebih dari separuh responden yang menyatakan tidak pernah BPD mengundang tokoh adat, agama dan tokoh pemuda untuk membicarakan pembangunan desa yaitu 179 atau 71,6 %. *Wawancara penulis 02 Desember 2009*

Pada tabel XVIII dijelaskan tentang bagaimana BPD mengayomi dan menjaga adat istiadat Desa Ranah untuk perencanaan pembangunan yaitu 90 atau 36 % responden menyatakan kadang-kadang. *Wawancara penulis 02 Desember 2009*

Pada tabel XIX disana dijelaskan lebih dari separuh responden yang menyatakan tidak pernah BPD menetapkan peraturan desa menyimpang dari adat istiadat Desa Ranah yaitu 144 atau 57 %. *Wawancara penulis 02 Desember 2009*

Pada tabel XX di sana jelaskan lebih dari separuh responden yang menyatakan kadang-kadang BPD menghadiri musyawarah rencana pembangunan desa (MUSRENBANGDes) yaitu 131 atau 52,4 %. *Wawancara penulis 02 Desember 2009*

Sementara itu Pada tabel XXI di sana dijelaskan jawaban responden yang menyatakan bahwa BPD kadang-kadang tidak menghadiri undangan kepala desa untuk perencanaan pembangunan yaitu 96 atau 38,4 %. *Wawancara penulis 02 Desember 2009*

Pada tabel XXII di jelaskan jawaban responden yang menyatakan tahu tentang yang menetapkan APBDes dilingkungannya adalah BPD Desa Ranah yaitu 90 atau 36 % .*Wawancara penulis 02 Desember 2009*

Pada tabel XXIII di atas sangat jelas lebih dari separuh responden menyatakan pernah utusan BPD dengan utusan BPD Dusun lainnya konflik di dalam musyawarah pembangunan desa yaitu 136 atau 54,4 %. *Wawancara penulis 02 Desember 2009*

Pada tabel XXIV disana sangat jelas lebih dari separuh responden yang menyatakan tahu tentang program yang telah dirumuskan oleh lembaga BPD untuk pembangunan Desa Ranah tahun anggaran 2009-2010 yaitu 179 atau 71,6%. *Wawancara penulis 02 Desember 2009*

Pada tabel XXV ini sangat jelas jawaban responden tentang tidak pernah lembaga BPD mengundang masyarakat Desa Ranah untuk membicarakan pembangunan desa yaitu 153 atau 61,2 %. *Wawancara penulis 02 Desember 2009*

Pada tabel XXVI ini sangat jelas hampir dari separuh jawaban responden kurang tahu tentang program yang akan dilakukan oleh lembaga BPD untuk Tahun Anggaran 2009-2010. *Wawancara Penulis 02 Desember 2009*

Sementara itu Pada tabel XXVII sangat jelas lebih dari separuh jawaban responden kurang tahu tentang berapa kali dalam setahun musyawarah dilakukan oleh BPD untuk pembangunan Desa yaitu 113 atau 45,2 %. *Wawancara Penulis 02 Desember 2009.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan serta menganalisa Data dalam pembahasan ini, maka langkah penulis selanjutnya adalah akan memberikan kesimpulan dari kajian ini. Adapun kesimpulan dari kajian penelitian ini adalah :

1. Hadirnya lembaga Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah dengan adanya angin segar yang di bawah oleh arus reformasi dan juga sebagai alat kontrol bagi pemerintah Desa dalam menjalankan tugas-tugas Pamerintahan Desa di samping dari itu Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai mitra kepala Desa hal ini terbukti dengan adanya program-program BPD yang belum sepenuhnya terealisasi dan kurangnya koordinasi pihak Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan pihak Desa serta masyarakat yang berdomisili di Desa Ranah dengan nilai 53,53 % dimana nilai tersebut berada dalam katagori tidak Berperan dalam perencanaan pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kampar.

B. Saran-Saran

Sehubungan dengan kesimpulan dari judul penelitian di atas maka penulis akan memberikan saran-saran dan di harapkan semoga saran ini dapat berguna bagi kita semua, terutama bagi Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Ranah Kecamatan Kampar adapun saran-saran tersebut yaitu :

1. Dilihat dari hasil analisa data yang telah penulis lakukan, maka terbukti bahwa peranan Masyarakat terhadap Badan Perwakilan Desa (BPD) dikatakan tidak Berperan dalam perencanaan pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kampar hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi, komunikasi yang baik antar pemerintah Desa dan masyarakat Desa Ranah, karena seperti yang penulis amati bahwa Badan Perwakilan Desa sangat membutuhkan adanya penyuluhan atau bimbingan dari pihak Kecamatan.
2. Disini juga penulis menyarankan agar Badan Perwakilan Desa tetap aktif dan disiplin sehingga pada waktu yang akan datang lebih sukses dalam menjalankan program-program untuk peningkatan pembangunan.
3. Berhubungan dengan kemampuan penulis yang masih cukup terbatas Dalam menyajikan skripsi ini yang berjudul : Peranan Masyarakat Terhadap Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Ranah Kecamatan Kampar: maka penulis mengharapkan masukan-masukan yang bersipat membangun dari semua pihak, dan penulis mengharapkan agar penelitian berikutnya bisa meneliti dengan permasalahan yang lain pula. (*Amin*)

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Yogyakarta; Pembaharuan, 2005
- Abipraja, Soedjono, *Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Surabaya, Airlangga Press 2002
- Ali, Faried, *Metode Penelitian Sosial Dalam Bidang Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1997
- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005
- Handyaningrat, Soewarno, *Administrasi Pemerintah dalam Pembangunan*, Jakarta, Gunung Agung 1984
- Kartasamita, Ginandjar, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, LP3ES, 1997
- Kuncoro, Mudrajad, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga. Jakarta 2004
- Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 04 tentang Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa.
- Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 09 tentang Badan Perwakilan Desa (BPD).
- Nugroho, D, Riant, *Reinventing Pembangunan*. PT. Elex Media Komputindo. 2003
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan Badan Perwakilan Desa*.
- Reksopoetranto, Soemardi, *Manajemen Proyek*, Jakarta, LPEE UI, 1992
- Siagiaan, Sondang P. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*, Jakarta Gunung Agung 1992
- Singarimbun Masri, Effendi Sofyan, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta 1989
- Soekartawi, *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan*, Rajawali, Jakarta 1990
- Soetrisno, Loekman, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta; Kamisiaus, 1995

- Suharsimi, Arikunto, Prof. DR, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998
- Tarigan, Robionson, *Perencanaan Pembangunan Wilayah : Pendekatan Ekonomi dan Ruang*, Departemen Pendidikan Nasional, Medan 2002
- Tjokroamidjojo, Bintoro. *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta, Gunung Agung. 1994
- Tjokrowinoto, Moeliarto, *Politik Pembangunan*, Tiara Wicana Yogyakarta, 1995
- Undang-Undang Otonomi Daerah 2004, Citra Umbara, Bandung, 2004
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*
- Widjaja. HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Widjaja, HAW, *Titik Berat Otonomi Daerah pada Tingkat II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

DAFTAR TABEL

TABEL I	: KEADAAN KANTOR KEPALA DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR.....	19
TABEL II	: JUMLAH PENDUDUK DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN JENIS KELAMIN	20
TABEL III	: JUMLAH PENDUDUK DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT MATA PENCAHARIAN	21
TABEL IV	: JUMLAH PENDUDUK DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN JUMLAH PEMELUK AGAMA	22
TABEL V	: DAFTAR JUMLAH RUMAH IBADAH DI DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR.....	23
TABEL VI	: KLASIFIKASI JUMLAH PENDUDUK DESA RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN	24
TABEL VII	: JAWABAN RESPONDEN TENTANG PERNAHKAH BPD DESA RANAH MENAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT	26
TABEL VIII	: JAWABAN RESPONDEN TENTANG TAHUKAH BAPAK ATAU IBU KEBERADAAN BPD DI LINGKUNGAN BAPAK.....	27
TABEL IX	: JAWABAN RESPONDEN TENTANG TAHUKAH BAPAK ATAU IBU JUMLAH ANGGOTA BPD DI LINGKUNGAN BAPAK	28
TABEL X	: JAWABAN RESPONDEN TENTANG TAHUKAH BAPAK ATAU IBU BAHWA KEGIATAN BPD MENYANGKUT UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT	29
TABEL XI	: JAWABAN RESPONDEN TENTANG TAHUKAH BAPAK ATAU IBU FUNGSI DAN WEWENANG BPD YANG ADA DILINGKUNGAN BAPAK	30
TABEL XII	: JAWABAN RESPONDEN TENTANG PERNAHKAH BPD DESA RANAH MENCIPTAKAN KOMUNIKASI YANG BAIK	

	ANTAR PEMERINTAH DESA.....	31
TABEL XIII :	JAWABAN RESPONDEN TENTANG TAHUKAH BAPAK ATAU IBU PROGRAM –PROGRAM BPD YANG ADA DI LINGKUNGAN BAPAK	32
TABEL XIV:	JAWABAN RESPONDEN TENTANG TAHUKAH BAPAK ATAU IBU PROGRAM APA SAJA YANG TELAH DILAKUKAN BPD TAHUN 2009.....	33
TABEL XV :	JAWABAN RESPONDEN TENTANG TAHUKAH BAPAK ATAU IBU BAGAIMANA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA BPD DI LINGKUNGAN BAPAK	34
TABEL XVI :	JAWABAN RESPONDEN TENTANG TAHUKAH BAPAK ATAU IBU BAGAIMANA BPD MENINDAK LANJUTI USUL ATAU PENDAPAT MASAYARAKAT KE TINGKAT KECAMATAN	35
TABEL XVII :	JAWABAN RESPONDEN TENTANG PERNAHKAH BPD MENGUNDANG TOKOH ADAT, AGAMA DAN TOKOH PEMUDA UNTUK MEMBICARAKAN PEMBANGUNAN DESA	36
TABEL XVIII :	TAHUKAH BAPAK ATAU IBU BAGAI MANA BPD MENGAYOMI DAN MENJAGA ADAT ISTIADAT DESA RANAH UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN	37
TABEL XIX :	PERNAHKAH BPD MENETAPKAN PERATURAN DESA MENYIMPANG DARI ADAT-ISTIADAT DESA RANAH	38
TABEL XX :	PERNAHKAH ANGGOTA BPD TIDAK MENGHADIRI MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDes).....	39
TABEL XXI :	JAWABAN RESPONDEN TENTANG PERNAHKAH ANGGOTA BPD TIDAK MENGHADIRI UNDANGAN KEPALA DESA UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA RANAH	40
TABEL XXII :	JAWABAN RESPONDEN TENTANG TAHUKAH BAPAK ATAU IBU YANG MENETAPKAN APBDes DI LINGKUNGAN BAPAK ADALAH BPD DESA RANAH:	41
TABEL XXIII :	JAWABAN RESPONDEN TENTANG PERNAHKAH ANGGOTA BPD UTUSAN DUSUN DENGAN UTUSAN DUSUN LAINNYA KONFLIK DALAM MUSYAWARAH	

PEMBANGUNAN DESA	42
TABEL XXIV : JAWABAN RESPONDEN TENTANG TAHUKAH BAPAK ATAU IBU PROGRAM APA SAJA YANG TELAH DIRUMUSKAN OLEH LEMBAGA BPD UNTUK PEMBANGUNAN DESA RANAH TAHUN ANGGARAN	43
TABEL XXV : JAWABAN RESPONDEN TENTANG PERNAHKAH LEMBAGA BPD MENGUNDANG MASYARAKAT DESA RANAH UNTUK MEMBICARAKAN PEMBANGUNAN DESA	44
TABEL XXVI : JAWABAN RESPONDEN TENTANG TAHUKAH BAPAK ATAU IBU PROGRAM APA SAJA YANG AKAN DILAKUKAN OLEH LEMBAGA BPD UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009-2010	45
TABEL XXVII : JAWABAN RESPONDEN TENTANG TAHUKAH BAPAK ATAU IBU BERAPA KALI DALAM SATU TAHUN MUSYAWARAH DI LAKUKAN OLEH BPD UNTUK PEMBANGUNAN DESA.....	46

ANGKET/ DAFTAR WAWANCARA

1. PERNAHKAH BPD DESA RANAH MENAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT?
 - A. PERNAH
 - B. KADANG-KADANG
 - C. TIDAK PERNAH
2. TAHUKAH BAPAK ATAU IBU KEBERADAAN BPD DI LINGKUNGAN BAPAK ?
 - A. TAHU
 - B. KURANG TAHU
 - C. TIDAK TAHU
3. TAHUKAH BAPAK ATAU IBU JUMLAH ANGGOTA BPD DI LINGKUNGAN BAPAK
 - A. TAHU
 - B. KURANG TAHU
 - C. TIDAK TAHU
4. TAHUKAH BAPAK ATAU IBU BAHWA KEGIATAN BPD MENYANGKUT UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT ?
 - A. TAHU
 - B. KURANG TAHU
 - C. TIDAK TAHU
5. TAHUKAH BAPAK ATAU IBU FUNGSI DAN WEWENANG BPD YANG ADA DILINGKUNGAN BAPAK ?
 - A. TAHU
 - B. KURANG TAHU
 - C. TIDAK TAHU

6. PERNAHKAH BPD DESA RANAH MENCIPTAKAN KOMUNIKASI YANG BAIK ANTAR PEMERINTAH DESA ?
 - A. PERNAH
 - B. KADANG-KADANG
 - C. TIDAK PERNAH
7. TAHUKAH BAPAK ATAU IBU PROGRAM –PROGRAM BPD YANG ADA DI LINGKUNGAN BAPAK ?
 - A. TAHU
 - B. KURANG TAHU
 - C. TIDAK TAHU
8. TAHUKAH BAPAK ATAU IBU PROGRAM APA SAJA YANG TELAH DILAKUKAN BPD TAHUN 2009 ?
 - A. TAHU
 - B. KURANG TAHU
 - C. TIDAK TAHU
9. TAHUKAH BAPAK ATAU IBU BAGAIMANA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA BPD DI LINGKUNGAN BAPAK ?
 - A. TAHU
 - B. KURANG TAHU
 - C. TIDAK TAHU
10. TAHUKAH BAPAK ATAU IBU BAGAIMANA BPD MENINDAK LANJUTI USUL ATAU PENDAPAT MASAYARAKAT KE TINGKAT KECAMATAN
 - A. TAHU
 - B. KURANG TAHU
 - C. TIDAK TAHU

11. PERNAHKAH BPD MENGUNDANG TOKOH ADAT, AGAMA DAN TOKOH PEMUDA UNTUK MEMBICARAKAN PEMBANGUNAN DESA ?
- A. PERNAH
 - B. KADANG-KADANG
 - C. TIDAK PERNAH
12. TAHUKAH BAPAK ATAU IBU BAGAI MANA BPD MENGAYOMI DAN MENJAGA ADAT ISTIADAT DESA RANAH UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN ?
- A. TAHU
 - B. KURANG TAHU
 - C. TIDAK TAHU
13. PERNAHKAH BPD MENETAPKAN PERATURAN DESA MENYIMPANG DARI ADAT-ISTIADAT DESA RANAH ?
- A. PERNAH
 - B. KADANG-KADANG
 - C. TIDAK PERNAH
14. PERNAHKAH ANGGOTA BPD TIDAK MENGHADIRI MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDes) ?
- A. PERNAH
 - B. KADANG-KADANG
 - C. TIDAK PERNAH
15. PERNAHKAH ANGGOTA BPD TIDAK MENGHADIRI UNDANGAN KEPALA DESA UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA RANAH ?
- A. PERNAH
 - B. KADANG-KADANG
 - C. TIDAK PERNAH

16. TAHUKAH BAPAK ATAU IBU YANG MENETAPKAN APBDes DI LINGKUNGAN BAPAK ADALAH BPD DESA RANAH ?
- A. TAHU
 - B. KURANG TAHU
 - C. TIDAK TAHU
17. PERNAHKAH ANGGOTA BPD UTUSAN DUSUN DENGAN UTUSAN DUSUN LAINNYA KONFLIK DI DALAM MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA ?
- A. TAHU
 - B. KURANG TAHU
 - C. TIDAK TAHU
18. TAHUKAH BAPAK ATAU IBU PROGRAM APA SAJA YANG TELAH DIRUMUSKAN OLEH LEMBAGA BPD UNTUK PEMBANGUNAN DESA RANAH TAHUN ANGGARAN 2009-2010 ?
- A. TAHU
 - B. KURANG TAHU
 - C. TIDAK TAHU
19. PERNAHKAH LEMBAGA BPD MENGUNDANG MASYARAKAT DESA RANAH UNTUK MEMBICARAKAN PEMBANGUNAN DESA ?
- A. PERNAH
 - B. KADANG-KADANG
 - C. TIDAK PERNAH
20. TAHUKAH BAPAK ATAU IBU PROGRAM APA SAJA YANG AKAN DILAKUKAN OLEH LEMBAGA BPD UNTUK TAHUN ANGARAN 2009-2010
- A. TAHU
 - B. KURANG TAHU
 - C. TIDAK TAHU

21. TAHUKAH BAPAK ATAU IBU BERAPA KALI DALAM SATU TAHUN
MUSYAWARAH DI LAKUKAN OLEH BPD UNTUK PEMBANGUNAN DESA

- A. TAHU
- B. KURANG TAHU
- C. TIDAK TAHU